

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory adalah harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi *shareholder* dan manajemen, atau dapat juga terjadi antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain dibawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak. (conceptaccounting.blogspot.co.id)

Menurut Murwaningsari (2009) Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Raharjo (2007) juga menyatakan bahwa teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan manajer sebagai *steward* / pelayan / *agent*. Teori *stewardship* menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan *pricipal*. Selain itu perilaku *steward* tidak

akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya. *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Raharjo (2007) Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.

Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa *Steward* mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving*. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan *steward*, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Manajemen

Menurut Sutanta (2003) sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Sutanto (2007) mendefenisikan informasi sebagai hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat. Sedangkan menurut Nugroho (2007) sebagai suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.

Sistem informasi manajemen menurut Siswnto (2012) adalah Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna bagi kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Proses Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sebuah sistem membutuhkan sebuah proses untuk menjalankannya, begitu pula Sistem Informasi Manajemen, Berikut bagaimana proses SIM dilakukan. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas :

1. Perencanaan

formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengendalian

perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.

3. Pengambilan keputusan

proses pemilihan diantara berbagai *alternative* disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih.

2.2.3 Definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan disetiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- b) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- c) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d) Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*, dan Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- 1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- 2) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin), dan
- 3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
- 4) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
- 5) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008) yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing- msing dinas/ lembaga

Tugas SIMDA adalah:

- 1) Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design *Data Base Management System (DBMS)*.
- 2) Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
- 3) Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008) :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

SIMDA yang terintegrasi adalah Aplikasi SIMDA yang dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan :

- 1) Pengendalian transaksi terjamin.
- 2) Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- 3) Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

2.2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Program aplikasi komputer SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penata usahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

1. Perkembangan SIMDA

SIMDA mengalami empat tahapan perubahan, yaitu :

a. SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan *draft* sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil diaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah.

b. SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai

aplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

c. SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling update yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

d. SIMDA Ver 2.7

Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Ver 2.7 berbasis *accrual* antara lain, PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan PMK 238, PMK 05 2011 tentang pusat. Permendagri no 64 tahun 2013 tentang pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis *accrual* pada pemda output aplikasi antara lain APBD beserta perubahannya, Jurnal transaksi *accrual*, Buku besar, Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, serta pertanggungjawaban. mekanisme dan output penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada permendagri 13 tahun 2006 No 59 tahun 2007, No 55, No 21 dan seterusnya proses dan output akuntansi berpedoman pada PP 71 Tahun 2010, PMK 238 tahun 2011 dan permendagri No 64 tahun 2013 aplikasi ini didukung dengan pedoman penyusunan kepada kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis aplikasi SIMDA *accrual*.

2. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

➤ Penganggaran

- Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan
- Surat Penyediaan Dana (SPD).

➤ Penatausahaan

- Surat Penyediaan Dana (SPD).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Surat Tanda Setoran (STS).
- Register, dan
- Formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

➤ Akuntansi dan Pelaporan

- Jurnal.
- Buku Besar.
- Buku Pembantu.
- Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca).
- Laporan Arus kas.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

3. Fungsi Program Aplikasi SIMDA

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan.
- b. Keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban).
- c. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
- d. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.

- e. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan, dan
- f. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

Mardiasmo (2002) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan terus dikembangkan sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang akurat seiring dengan tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga sektor publik.

Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.3 Integrasi Organisasi

Menurut Siswanto (2005) dalam buku pengantar manajemen organisasi dalam arti statis adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi serta otoritas dan tanggungjawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberi tugas atau tanggungjawab atas setiap fungsi yang bersangkutan.

Integrasi menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan, agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Pengintegrasian ini sangat penting karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan semua pihak didalamnya. Integrasi meliputi usaha menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antara tenaga kerja dengan organisasi, yang telah menyangkut masalah motivasi, konflik dan konseling.

Ada beberapa pengertian tentang integrasi organisasi menurut para ahli :

Menurut Kumorotomo (2007) Integrasi organisasi adalah pengelompokan beberapa orang dalam suatu wadah yang tersusun dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama dalam suatu jaringan informasi.

Integrasi organisasi merupakan hubungan antara pegawai instansi, antara kebijakan dan tujuan organisasi.

Integrasi atau koordinasi dilakukan dengan cara :

1. Formalisasi (kebijakan, aturan, prosedur).
2. Sentralisasi (fokus pembuat kebijakan).
3. Rentang kendali (membatasi jumlah karyawan yang harus diawasi).
4. Standardisasi (kerja, keahlian, output).
5. Strategi organisasi.
6. Usia dan besaran organisasi.
7. Teknologi.
8. Kondisi lingkungan.
9. Pengendalian.

Masnoni dan Latifah (2007) integrasi organisasi adalah kualitas kolaborasi yang ada diantara departemen yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dengan lingkungan yang ada.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa integrasi organisasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Integrasi organisasi adalah kualitas kolaborasi yang ada diantara departemen yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dengan lingkungan yang ada. Integrasi dicapai melalui kekuatan kerja, inter departemen komite dan personil yang saling berhubungan untuk mengkoordinasikan aktivitas dari departemen yang saling tergantung.
- ❖ mekanisme integratif tersebut mengusulkan interaksi yang dapat membantu merekonsiliasikan perspektif yang berbeda dan mengembangkan kesatuan rencana dan strategi. Selain itu juga meningkatkan kesadaran bisnis dari manajer sistem informasi dan meningkatkan partisipasi top manajer dalam proses perencanaan sistem informasi

2.4 Kematangan Perencanaan Sistem Informasi

Menurut Chandarin & Indriantoro (1997) Konsep kematangan teknologi informasi digunakan untuk menentukan sejauh mana manajer menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam penerapan. Sedangkan menurut Alter (1996) Penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi, kualitas, efektifitas dan respons konsumen.

Menurut Prahaja dan Hasgoro (2009) menyatakan bahwa semakin matangnya perencanaan sistem informasi pada organisasi maka akan memudahkan proses penyesuaian teknologi informasi.

Kemampuan teknik dari personil sistem informasi akan berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi. Tingkat kematangan merupakan gambaran kematangan proses teknologi informasi yang berlangsung pada sebuah perusahaan. Model kematangan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan *benchmarking* dan *self-assessment* oleh manajemen teknologi informasi untuk menilai kematangan teknologi informasi yang telah diimplementasikan.

Dengan model kematangan, manajemen dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja aktual dari perusahaan – posisi perusahaan saat ini.
2. Status industri saat ini – perbandingan.
3. Target perbaikan bagi perusahaan – ke mana perusahaan ingin dibawa.
4. Arah pengembangan yang diperlukan dari *as-is* menjadi *to-be*.

Konsep kematangan sistem informasi untuk menentukan sejauh mana penggunaan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan respons konsumen. Dengan kematangan sistem informasi akan mempercepat perusahaan dalam merespons kepada perubahan lingkungan bisnis.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ismail (2004)	Integrasi Organisasi berpengaruh terhadap Implementasi SIKD.	Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan integrasinya. Sebagian besar organisasi akan memperoleh kemanfaatan yang besar dari meningkatnya derajat integrasi organisasi yang mereka miliki.
2	Masnoni dan Latifah (2007)	Pengaruh Integrasi Organisasi terhadap Kematangan Perencanaan Sistem Informasi dan Implikasinya terhadap Kesuksesan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (studi empiris pada pemerintahan daerah kota Palembang).	Hasilnya adalah integrasi perencanaan organisasi merupakan kata kunci dari sistem informasi manajemen.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

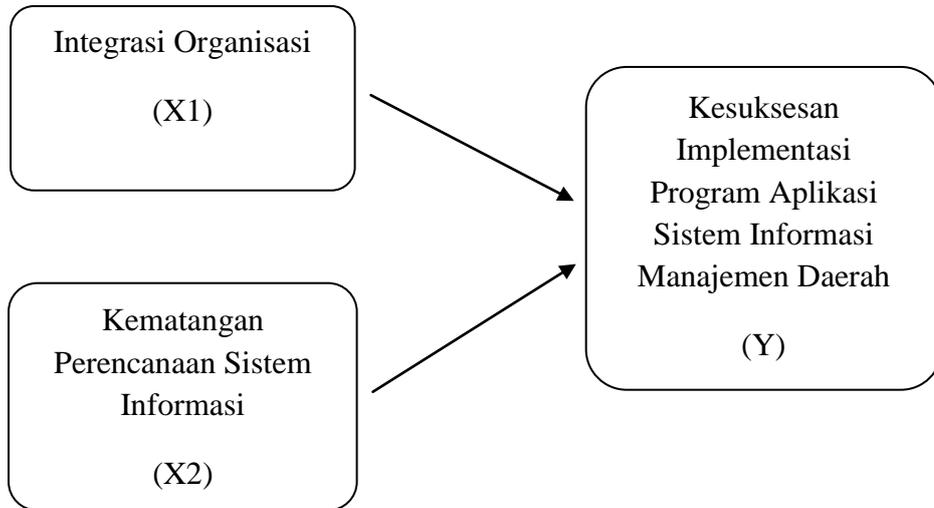
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Sariyun Naja Anwar (2009)	Pengaruh Kematangan Teknologi Informasi dan Kinerja Sistem Informasi terhadap Kemanfaatan Sistem Informasi bagi Kelurahan-kelurahan di Kota Semarang.	Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi kelurahan dalam penambahan investasi dalam bidang teknologi informasi.
4	Noormaliya (2015)	Pengaruh integrasi organisasi dan kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah (studi empiris pada SKPD kota Padang).	<p>Hasil penelitiannya :</p> <p>Integrasi Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi program <i>system</i> informasi keuangan daerah.</p> <p>Kematangan perencanaan <i>system</i> informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi program <i>system</i> informasi keuangan daerah.</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Natalia Deisi Lumintang (2015)	Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota manado.	Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum pegawai BPK-BMD Manado sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, Sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah integrasi organisasi, kematangan perencanaan sebagai variabel independen (bebas). Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kesuksesan implementasi program sistem informasi manajemen daerah. Oleh karena itu kerangka pemikiran yang terbentuk adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.7 Bangunan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang didapat belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empiris.

2.7.1 Pengaruh Integrasi Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Integrasi organisasi adalah kualitas kolaborasi yang ada diantara departemen yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dengan lingkungan yang ada. Integrasi dicapai melalui kekuatan kerja, interdepartemen komite dan personel yang saling berhubungan untuk mengkoordinasikan aktivitas dari departemen yang saling tergantung.

Menurut Prenkumar & Kim (1994) mekanisme integratif tersebut mengusulkan interaksi yang dapat membantu merekonsiliasikan perspektif yang berbeda dan mengembangkan kesatuan rencana dan strategi. Selain itu juga meningkatkan kesadaran bisnis dari manajer sistem informasi dan meningkatkan partisipasi top manajer dalam proses perencanaan sistem informasi.

Dalam penelitian Noormaliya (2015) tentang pengaruh integrasi organisasi dan kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah. Hasilnya bahwa integrasi organisasi mempengaruhi kematangan perencanaan sistem informasi dan berpedoman terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H₁ : Terdapat pengaruh integrasi organisasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah.

2.7.2 Pengaruh Kematangan Perencanaan Sistem Informasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Beberapa studi empiris telah menemukan bukti adanya suatu hubungan yang positif antara kematangan perencanaan sistem informasi dan kesuksesan sistem informasi. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kematangan perencanaan sistem dan kesuksesan sistem informasi secara umum mengimplikasikan bahwa arah pengaruh tersebut yaitu kematangan perencanaan sistem informasi mempengaruhi kesuksesan informasi.

Menurut Chandarin & Indriantoro (1997) Konsep kematangan teknologi informasi digunakan untuk menentukan sejauh mana manajer menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam penerapan. Sedangkan menurut Alter (1996) Penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi, kualitas, efektifitas dan respons konsumen.

Kematangan perencanaan sistem informasi organisasi didefinisikan sebagai seberapa jauh proses perencanaan sistem informasi membantu menciptakan kesempatan bagi sistem informasi untuk membuat suatu kontribusi strategis bagi organisasi. Kematangan perencanaan sistem informasi terdiri dari dua dimensi yaitu : perilaku perencanaan sistem informasi dan *knowledge overlape*.

Sementara pengaruh sebaliknya yaitu kesuksesan sistem informasi mempengaruhi kematangan perencanaan sistem informasi diabaikan karena belum ada penelitian empiris yang menguji alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga akan dilihat pengaruh sebaliknya.

Dalam penelitian Noormaliya (2015) tentang pengaruh integrasi organisasi dan kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah. Hasilnya bahwa integrasi organisasi mempengaruhi kematangan perencanaan sistem informasi dan berpedoman terhadap kesuksesan implementasi program sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan teori dari hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H₂ : Terdapat pengaruh kematangan perencanaan sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah.